



**Pemerintah Provinsi Lampung**

# **Rencana Kinerja Tahun TA. 2017**



**Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung**

***Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124***

***Bandar Lampung***

**Web : [koperasiumkm.lampungprov.go.id](http://koperasiumkm.lampungprov.go.id)**

**E-Mail : [perencanaankoperasi15@gmail.com](mailto:perencanaankoperasi15@gmail.com)**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan 10 (*Sepuluh*) program dan 43 (*Empat Puluh Tiga*) kegiatan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 8.700.000.000,- (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung,        Januari 2017

KEPALA DINAS,

**SATRIA ALAM, SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610307 198603 1 007

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal	
HALAMAN RINGKASAN EKSEKUTIF	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	I – 1
1.2.	Dasar Hukum	I – 2
1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi	I – 4
1.4.	Susunan Organisasi	I – 6
1.5.	Maksud dan Tujuan	I – 9
BAB II	RENCANA STRATEGIS	
2.1.	Rencana Strategis 2015 - 2019	... II – 1
2.2.	Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu	... II – 4
2.3.	Rencana Kerja Tahun 2017	II – 5
BAB IV	PENUTUP	... VI – 1

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015–2019 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 8.700.000.000,- (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*), mencakup 43 (*Empat Puluh Tiga*) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan biaya Rp. 2.000.000,-
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 225.000.000,-
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 340.600.000,-
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 110.000.000,-
5. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 18.000.000,-
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan biaya Rp. 15.000.000,-
7. Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan biaya Rp. 40.000.000,-
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan biaya Rp. 16.000.000,-
9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 10.000.000,-
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 117.900.000,-
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan biaya Rp. 78.500.000,-
12. Pameran dan Promosi Pembangunan, dengan biaya Rp. 80.000.000,-
13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 94.600.000,-
14. Pengadaan Peralatan gedung kantor, dengan biaya Rp. 265.734.000,-
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan biaya Rp. 15.000.000,-
16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya Rp. 89.000.000,-

17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan biaya Rp. 10.000.000,-
18. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya Rp. 120.000.000,-
19. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 44.000.000,-
20. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 122.400.000,-
21. Penyusunan program dan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 85.000.000,-
22. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 42.306.000,-
23. Peningkatan Data dan Informasi, dengan biaya Rp. 52.000.000,-
24. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS, dengan biaya Rp. 61.990.000,-
25. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM, dengan biaya Rp. 150.000.000,-
26. Monitoring dan evaluasi koperasi penerima bantuan di 15 Kab/Kota, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
27. Pengawasan pelaksanaan USP bagi KSP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit, dengan biaya Rp. 96.250.000,-
28. Pendampingan pameran KUKM dalam dan luar negeri, dengan biaya Rp. 807.840.000
29. Pendataan dan pembinaan KUMKM, dengan biaya Rp. 600.000.000,-
30. Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT), dengan biaya Rp. 100.000.000,-
31. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 600.000.000,-
32. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
33. Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon/penerima dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
34. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 2.000.000.000
35. Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur, dengan biaya Rp. 300.000.000,-

36. Peningkatan dan pemahaman terhadap aturan perkoperasian, dengan biaya Rp. 62.458.000,-
37. Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan, dan penilaian KSP/USP, dengan biaya Rp. 52.840.000,-
38. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi, dengan biaya Rp. 127.062. 000,-
39. Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi, dengan biaya Rp. 63.320.000
40. Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 94.600.000,-
41. Diklat akuntabilitas bagi pengelola koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
42. Pembina dan pengawas koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
43. Penyelenggaraan musrenbang SKPD, dengan biaya Rp. 230.600.000,-

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada mulanya Kantor Wilayah Perindustrian dan Kantor Wilayah Koperasi berdiri masing-masing. Pada tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000, tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2007, Diskoperindag Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung terpisah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bergabung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sampai dengan akhir Desember 2014 yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali

menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Provinsi Lampung. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

## 1.2. Dasar Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.



10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan 2029.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

### 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung berubah Nomenklatur tepatnya tanggal 21 Nopember 2016 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi :

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

##### 1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

- dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. pemfasilitasian tugas perbantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
  - e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
  - f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
  - g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
  - h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
  - i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan ditingkat provinsi;
  - j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
  - k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
  - l. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
  - m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dan Jam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
  - n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);

- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.4. Susunan Organisasi

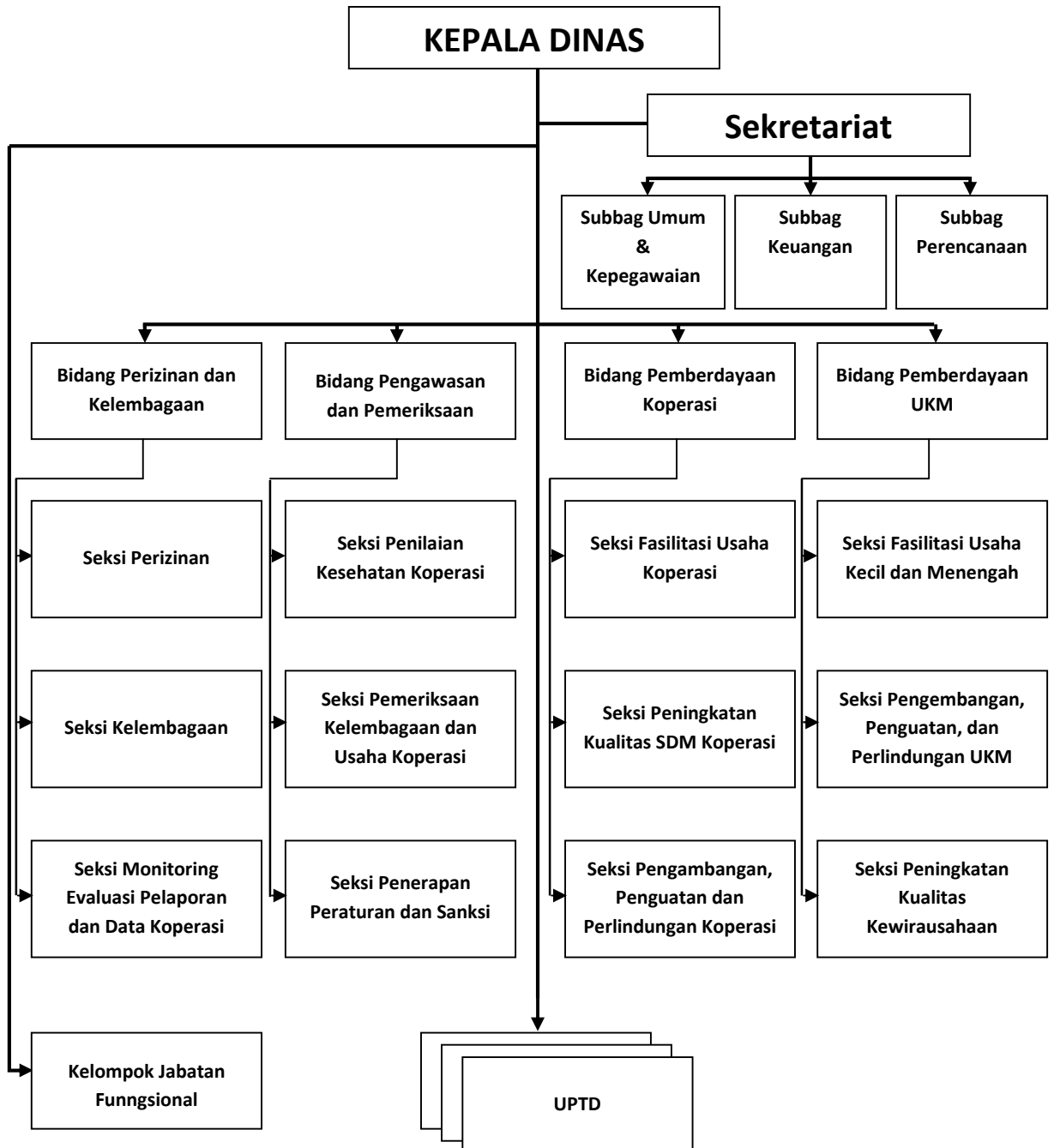
- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi :
    - 1. Seksi Perizinan;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan;
    - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
  - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
    - 1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
    - 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
    - 3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
  - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
    - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
    - 2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
    - 3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:
    - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
    - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan
    - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang- bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf I, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
  - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

## Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Koperasi dan UKM

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Lampung  
Nomor : 8 Tahun 2016  
Tanggal : 21 Nopember 2016



## 1.5. Maksud dan Tujuan

### 1.5.1. Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah merupakan sebagai tindaklanjut / break down dari Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2017 (desentralisasi) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung.

RKT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung merupakan rencana Pembangunan tahunan yang menjabarkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan anggaran sesuai program/kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang dituangkan dalam dokumen RKT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2017.

### 1.5.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah memberi acuan dan tolok ukur untuk mengambil keputusan tentang tingkat kinerja yang akan dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai anggaran pada tahun bersangkutan dalam rangka perwujudan peningkatan Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan analisis pada terdahulu maka dapat disusun Rencana Strategis yaitu Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk rencana pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Program pembangunan pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama lima tahun mendatang (2015 sampai dengan 2019) terdiri atas 13 (tiga belas) program pembangunan sebagaimana yang terinci dalam Tabel 5.1, yaitu:

1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah KUMKM yang terfasilitasi peningkatan sistem pendukung usahanya
2. Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah KUMKM yang mendapat fasilitas akses permodalan BLUD
3. Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah koperasi dan umkm yang meningkat usahanya
4. Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah koperasi dan umkm yang berkembang kelembagaannya



5. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitasnya
6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan/Revitalisasi Kelembagaan dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya
7. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat dan berkembang usahanya serta kelembagaannya
8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program adalah terwujudnya pelayanan perkantoran yang memenuhi tertib administrasi
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja program adalah tersedianya sarana dan prasarana aparatur
10. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikator kinerja program adalah jumlah paket kegiatan penunjang peningkatan disiplin aparatur.
11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator kinerja program adalah terwujudnya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
12. Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja adalah terwujudnya pelaksanaan peningkatan sistem capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan indikator kinerja adalah terwujudnya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan

#### 2.1.1. Matriks Renstra 2015 – 2019

## 2.1.1. Matrik Renstra 2015 - 2019

## Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan Bidang	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										
2	<b>11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>										
2	<b>11 15 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>										
2	11 15 2 Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal permodalan Bagi KUMKM	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 3 Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	0		100.000.000	50 Koperasi	150.000.000	75 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi
2	11 15 5 Rakor dengan Dinas/Instansi terkait tentang fasilitasi perizinan usaha simpan pinjam	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 6 Bintek dan transplantasi bagi Pengelola Koperasi Pola Konvensional dan syariah	0		100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11 15 7 Rakor Validasi/Pemutakhiran Data KSP/USP dan KJKS/UJKS	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 8 Workshop Evaluasi Penyaluran Dana Bergulir	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 9 Rakor pemberdayaan KUMKM di bidang pembiayaan	100.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 10 Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM	105.000.000	2 Angkatan	85.000.000	2 Angkatan	90.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan
2	11 15 11 Rakor Fasilitasi dan sosialisasi perusahaan penjamin kredit daerah	110.000.000	4 Kali	0		0		0		0	
2	11 15 12 Study komparasi tempat praktek keterampilan usaha (TPKU) bagi pengelola koperasi pondok pesantren	100.000.000	15 Orang	200.000.000	20 Orang	220.000.000	20 Orang	240.000.000	20 Orang	270.000.000	20 Orang
2	11 15 13 Rakor Pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM	120.000.000	15 kab/kota	120.000.000	15 kab/kota	120.000.000	15 kab/kota	125.000.000	15 kab/kota	150.000.000	15 kab/kota
2	11 15 14 Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	90.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg
2	11 15 15 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota	0		80.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg
2	11 15 16 Tranplantasi Dalam Rangka Pembentukan PPKD Provinsi Lampung	80.000.000	1 Kali	0		0		0		0	

2	11	15	17	Monitoring dan evaluasi program TPKU pada Pondok Pesantren dan SMK/SMU	0	100.000.000	15 Orang	110.000.000	15 Orang	120.000.000	15 Orang	135.000.000	15 Orang
2	11	15	18	Bimtek menggali potensi ide bisnis	0	160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang
2	11	15	19	Rakor program penilaian kesehatan dan pengawasan KSP/USP	0	200.000.000	4 Kali	200.000.000	4 Kali	200.000.000	4 Kali	200.000.000	4 Kali
2	11	15	20	Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit	0	50.000.000	50 Koperasi	50.000.000	10 Koperasi	50.000.000	10 Koperasi	50.000.000	10 Koperasi
2	11	15	21	Bimbingan teknis penyusunan proposal pengembangan usaha bagi KSP/USP	0	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11	15	22	Rakor penyusunan program pembinaan KSP/USP yang sehat mandiri dan berkembang	0	200.000.000	20 Paket	200.000.000	200 Paket	200.000.000	200 Paket	200.000.000	200 Paket
2	11	15	23	Rakor dengan dinas /instansi/pemangku kepentingan tentang peluang permodalan bagi KSP/USP	0	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi
2	11	15	24	Monev penilaian dan pengawasan kegiatan usaha bagi KSP/USP, KJKS/UJKS	0	100.000.000	50 Koperasi	150.000.000	75 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi
2	11	15	25	Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri	0	900.000.000	8 Keg	800.000.000	8 Keg	900.000.000	8 Keg	700.000.000	8 Keg
2	11	15	26	Rapat koordinasi provinsi dengan pusat	0	240.000.000	3 Keg	240.000.000	3 Keg	180.000.000	3 Keg	180.000.000	3 Keg
2	11	15	27	Pendataan dan pembinaan KUMKN	0	70.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg
2	11	15	28	Sosialisasi KUMK 15 kab/kota	0	70.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg
2	11	15	29	Temu konsultasi dinas koperasi/UMKM se Provinsi Lampung	0	80.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	70.000.000	1 Keg
2	11	15	30	Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam Provinsi dalam rangka pembinaan ke luar provinsi	0	180.000.000	2 Keg	190.000.000	2 Keg	180.000.000	2 Keg	180.000.000	2 Keg
2	11	15	31	Workshop evaluasi penyaluran dana bergulir	0	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11	15	33	Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	0	300.000.000	1 Provinsi	300.000.000	1 Provinsi	300.000.000	1 Provinsi	300.000.000	1 Provinsi
2	11	15	34	Promosi produk-produk unggulan di anjungan TMII	0	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg
2	11	15	35	Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	0	200.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	15	36	Bimtek manajemen usaha koperasi pengelolaan sistem resi gudang (SRG)	0	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg
2	11	15	37	Bimtek manajemen usaha pedagang kaki lima (PKL)	0	100.000.000	1 Keg	110.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	15	38	Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM	0	90.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg

2	11	15	39	Bimtek peningkatan jaringan usaha dan pemasaran bagi KUMKM berbasis produk unggulan daerah	0		100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	15	40	Bimtek manajemen usaha bagi pengelola koperasi pariwisata	0		80.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	95.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg
2	11	15	41	Transplantasi luar daerah provinsi lampung tentang pengelolaan pariwisata oleh koperasi	0		120.000.000	1 Keg	140.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg
2	11	15	42	Workshop temu usaha UKM Center	0		30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg
2	11	15	43	Pembinaan UKM di UKM Center	0		1.500.000.000	1 Keg	1.500.000.000	1 Keg	1.500.000.000	1 Keg	1.500.000.000	1 Keg
2	11	15	44	Bimtek anggota koperasi yang menghasilkan produk yang berdaya saing dalam menghadapi MEA	0		225.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg
2	11	15	45	Bimtek bagi pengurus koperasi pengelola pasar tradisional	0		250.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg
2	11	15	46	Transplantasi bagi pengurus koperasi pasar tradisional ke luar provinsi	0		300.000.000	2 Keg	300.000.000	2 Keg	300.000.000	2 Keg	300.000.000	2 Keg
2	11	15	47	Pembinaan KUMKM dalam menghadapi MEA	0		225.000.000	3 Keg	225.000.000	3 Keg	225.000.000	3 Keg	225.000.000	3 Keg
2	11	15	48	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	0		0		100.000.000	10 KUMKM	100.000.000	30 KUMKM	100.000.000	30 KUMKM
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM</b>										
2	11	16	1	Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	600.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%
2	11	16	4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	205.000.000	160 KUMKM	250.000.000	175 KUMKM	275.000.000	180 KUMKM	325.000.000	200 KUMKM	375.000.000	220 KUMKM
2	11	16	5	Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	130.000.000	80 KUMKM	150.000.000	80 KUMKM	200.000.000	90 KUMKM	250.000.000	100 KUMKM	300.000.000	110 KUMKM
2	11	16	6	Bimtek penyusunan Laporan keuangan bagi KUMKM penerima dana bergulir BLUD	120.000.000	60 KUMKM	150.000.000	70 KUMKM	200.000.000	70 KUMKM	250.000.000	80 KUMKM	325.000.000	90 KUMKM
2	11	16	7	Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM	70.000.000	70 KUMKM	100.000.000	85 KUMKM	175.000.000	100 KUMKM	225.000.000	140 KUMKM	300.000.000	170 KUMKM
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>17</b>		<b>Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM</b>										
2	11	17	1	Fasilitasi Peluang Permodalan bagi KUMKM	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11	17	4	Bimtek dan Transplantasi bagi Pengelola KUMKM	0		100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	17	8	Bimtek pengembangan usaha simpan pinjam pola konvensional dan pola syariah	0		170.000.000	4 Angkatan	180.000.000	4 Angkatan	180.000.000	4 Angkatan	200.000.000	4 Angkatan
2	11	17	9	Pembinaan LKM / BMT penerima bantuan modal kerja	0		100.000.000	50 LKM	100.000.000	50 LKM	100.000.000	50 LKM	100.000.000	50 LKM

2	11	17	10	Pembinaan KSP / USP penerima dana bergulir MAP, PKPS-BBM, agribisnis/sektoral P3KUM pola konvensional dan P3KUM pola syariah	0	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi
2	11	17	11	Rakor antara KSP/USP dengan lembaga keuangan	0	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>18</b>		<b>Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM</b>									
2	11	18	1	Diklat Strategi Pemasaran Bagi Pengelola Koperasi dan UMKM	0	70.000.000	30 Orang	0	0	80.000.000	30 Orang		
2	11	18	2	Diklat Studi Kelayakan Usaha bagi Pengelola Koperasi dan UMKM	0	0	65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	
2	11	18	3	Diklat Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Bagi Pembina Koperasi dan UMKM	0	0	75.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	85.000.000	30 Orang	
2	11	18	4	Diklat Perkoperasian bagi Pembina Koperasi dan UMKM	0	0	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	
2	11	18	5	Diklat Kewirausahaan bagi pengelola UMKM	0	50.000.000	25 Orang	0	75.000.000	30 Orang	85.000.000	30 Orang	
2	11	18	6	Diklat Kewirausahaan bagi Pengelola Koperasi wanita	0	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	0	0		
2	11	18	7	Pembinaan kelembagaan usaha dan administrasi bagi KSP/USP	0	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi
2	11	18	8	Bimtek manajemen pengembangan usaha dan kemitraan bagi koperasi dan jasa keuangan	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	18	9	Diklat manajemen koperasi bagi pengelola koperasi wanita	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	0	0		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>19</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM</b>									
2	11	19	6	Pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas wirausaha pemula	0	160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang
2	11	19	7	Bimtek penilaian kesehatan bagi pejabat	0	85.000.000	2 Angkatan	90.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan
2	11	19	8	Bimtek koperasi jasa keuangan bagi manajer berbasis kompetensi pola konvensional	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	19	9	Bimtek koperasi jasa keuangan bagi manajer berbasis kompetensi pola syariah	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	19	10	Diklat koperasi jasa keuangan bagi kasir berbasis kompetensi pola syariah	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	19	11	Bimtek perpajakan bagi pengelola koperasi	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	19	12	Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	19	13	Diklat pengawasan dan pembinaan koperasi bagi tenaga pengawas dan Pembina	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang

2	11	19	14	Bimtek sistem tanggung renteng bagi kopwan	0		200.000.000	100 Orang	0		0		0	
2	11	19	15	Bimtek vokasional bagi anggota kopwan	0		100.000.000	75 Orang	0		0		0	
2	11	19	16	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	0		0		0		0		0	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>20</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan</b>										
2	11	20	9	Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur	0		160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang
2	11	20	10	Sosialisasi program tempat praktek keterampilan usaha (TPKU) bagi SMK/SMU dan Pondok Pesantren	0		160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang
2	11	20	11	Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian	0		150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang
2	11	20	12	Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	0		125.000.000	30 Orang	125.000.000	30 Orang	125.000.000	30 Orang	125.000.000	30 Orang
2	11	20	13	Penyusunan program pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	0		150.000.000	100 Koperasi	175.000.000	125 Koperasi	175.000.000	150 Koperasi	175.000.000	150 Koperasi
2	11	20	14	Penyebarluasan peraturan / perundangan di bidang pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP / USP	0		100.000.000	250 Paket	100.000.000	250 Paket	100.000.000	250 Paket	100.000.000	250 Paket
2	11	20	15	Tranplantasi manajemen bagi pengurus KSP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit	0		325.000.000	4 Angkatan	350.000.000	4 Angkatan	320.000.000	4 Angkatan	400.000.000	4 Angkatan
2	11	20	16	Pencetakan juknis peluang permodalan bagi KSP/USP	0		160.000.000	300 Buku	175.000.000	300 Buku	175.000.000	300 Buku	175.000.000	300 Buku
2	11	20	17	Identifikasi KSP/USP calon penerima program pembiayaan dari LPDB dan lembaga lainnya	0		75.000.000	150 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi
2	11	20	18	Verifikasi terhadap KSP/USP calon penerima program pembiayaan	0		150.000.000	150 Koperasi	200.000.000	200 Koperasi	200.000.000	200 Koperasi	200.000.000	200 Koperasi
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>21</b>		<b>Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>										
2	11	21	1	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	200.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota
2	11	21	2	Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	100.000.000	15 kab/kota	650.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota
2	11	21	3	Workshop Revitalisasi Koperasi	80.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	120.000.000	100 Koperasi
2	11	21	4	Peningkatan Pemahaman terhadap aturan perpajakan bagi koperasi	100.000.000	100 KUMKM	0		0		0		0	

2	11	21	5	Rakor pembinaan terhadap Koperasi tidak aktif	150.000.000	15 kab/kota	165.000.000	15 kab/kota	180.000.000	15 kab/kota	198.000.000	15 kab/kota	217.800.000	15 kab/kota
2	11	21	6	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan kewirausahaan melalui pembentukan UKM Center	120.000.000	30 Orang	0		0		135.000.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang
2	11	21	7	Pemeringkatan Koperasi	100.000.000	60 Koperasi	110.000.000	60 Koperasi	121.000.000	60 Koperasi	133.100.000	60 Koperasi	146.410.000	60 Koperasi
2	11	21	8	Diklat membuat Website dan Internet Marketing bagi KUMKM	89.867.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	9	Pelatihan Akuntansi Komputer bagi koperasi usaha Ritel	80.000.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	10	Diklat Ketrampilan menjahit bagi Koppontren	80.000.000	32 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	11	Bimtek Peningkatan kelembagaan bagi Koperasi tidak aktif	150.000.000	60 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	12	Diklat Kewirausahaan Bidang Boga bagi Ibu RT dan Remaja Putus sekolah	80.000.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	13	Diklat pembuatan aneka souvenir khas Lampung	110.000.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	14	Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	134.000.000	15 kab/kota	150.000.000	15 kab/kota	150.000.000	15 kab/kota	160.000.000	15 kab/kota	160.000.000	15 kab/kota
2	11	21	15	Bimtek manajemen usaha bagi pengelola Koperasi penerima Bansos	70.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	21	16	Bimtek Kewirausahaan bagi UMKM	80.000.000	30 Orang	0		90.000.000	30 Orang	0		110.000.000	30 Orang
2	11	21	17	Pengembangan, pengendalian dan pengawasan Koperasi simpan pinjam	130.000.000	60 Orang	0		140.000.000	60 Orang	0		150.000.000	60 Orang
2	11	21	18	Pengembangan SDM bagi Pembina dan Koperasi Simpan Pinjam	150.000.000	60 Orang	0		150.000.000	60 Orang	160.000.000	60 Orang	170.000.000	60 Orang
2	11	21	19	Diklat pemasaran hasil usaha	0		0		70.000.000	30 Orang	85.000.000	30 Orang	0	
2	11	21	20	Diklat manajemen bisnis ritel	0		70.000.000	30 Orang	0		0		0	
2	11	21	21	Diklat akuntansi usaha bisnis ritel	0		0		70.000.000	30 Orang	0		0	
2	11	21	22	Diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi	0		75.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang
2	11	21	23	Diklat manajemen jasa keuangan syariah	0		0		0		75.000.000	30 Orang	0	
2	11	21	24	Diklat manajemen simpan pinjam terapan bagi pengelola koperasi	0		0		0		0		80.000.000	30 Orang
2	11	21	25	Diklat manajemen usaha simpan pinjam konvensional	0		70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	0		0	
2	11	21	26	Pelatihan kewirausahaan bagi wanita dan anak wilayah pesisir	0		75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	0		0	
2	11	21	27	Pemberdayaan kelompok usaha pemula	0		80.000.000	2 KUMKM	80.000.000	2 KUMKM	85.000.000	2 KUMKM	90.000.000	2 KUMKM
2	11	21	28	Diklat kewirausahaan bagi koperasi baru	0		70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang



2	11	21	29	Diklat perkoperasian bagi anggota koperasi	0	65.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	30	Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	31	Diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi	0	75.000.000	30 Orang	0	0	0	0	80.000.000	30 Orang
2	11	21	32	Diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan RAT bagi koperasi	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	33	Diklat perpajakan bagi koperasi	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	35	Diklat akuntabilitas bagi pengelola koperasi	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	30 Orang
2	11	21	36	Diklat studi kelayakan usaha bagi pengelola koperasi dan UMKM	0	0	65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	70.000.000	80.000.000	30 Orang
2	11	21	37	Diklat analisa pinjaman / pembiayaan usaha bagi pengelola koperasi	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	30 Orang
2	11	21	38	Diklat akuntansi dasar usaha kecil dan mengengah bagi pengelola koperasi	0	75.000.000	30 Orang	0	0	0	0	0	0
2	11	21	39	Diklat akuntansi simpan pinjam dasar pola konvensional	0	0	0	0	0	75.000.000	30 Orang	0	0
2	11	21	40	Diklat akuntansi simpan pinjam lanjutan pola konvensional	0	0	0	0	0	75.000.000	30 Orang	0	0
2	11	21	41	Diklat akuntansi jasa keuangan syariah	0	0	0	0	0	75.000.000	30 Orang	0	0
2	11	21	42	Diklat analisa laporan keuangan simpan pinjam pola konvensional	0	0	0	70.000.000	30 Orang	0	0	0	0
2	11	21	43	Diklat audit laporan keuangan	0	0	0	0	0	75.000.000	30 Orang	0	0
2	11	21	44	Diklat pengelola KSP/USP koperasi berbasis kompetensi pola konvensional	0	70.000.000	30 Orang	0	0	0	0	0	0
2	11	21	45	Diklat perkoperasian bagi pamong desa	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	0	0	80.000.000	30 Orang
2	11	21	46	Diklat peningkatan keterampilan aplikasi akuntansi koperasi	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	47	Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam	0	200.000.000	80 Orang	220.000.000	80 Orang	240.000.000	80 Orang	270.000.000	80 Orang
2	11	21	48	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	0	0	0	100.000.000	60 Koperasi	100.000.000	60 Koperasi	100.000.000	60 Koperasi
2	11	21	49	Diklat dan Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi	0	0	0	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang
4				<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
4	5			<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>									
4	5	19		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
4	5	19	1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	60.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan

5				<b>URUSAN PENDUKUNG</b>										
5	4			<b>Non Urusan (Eks BAU)</b>										
5	4	15		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
5	4	15	1	Penyediaan jasa surat menyurat	28.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan
5	4	15	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan
5	4	15	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	212.400.000	12 Bulan	245.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	280.000.000	12 Bulan	315.000.000	12 Bulan
5	4	15	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28.443.600	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan
5	4	15	10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan
5	4	15	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan
5	4	15	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.054.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan
5	4	15	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0		0		0		0		0	
5	4	15	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan
5	4	15	17	Penyediaan makanan dan minuman rapat	35.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan
5	4	15	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	148.907.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan
5	4	15	22	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	68.004.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan
5	4	15	29	Pameran dan Promosi Pembangunan	53.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	175.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg
5	4	16		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
5	4	16	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0		0		0		300.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket
5	4	16	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	400.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	450.000.000	1 Paket
5	4	16	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0		0		0		0		0	
5	4	16	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0		200.000.000	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan
5	4	16	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	143.253.400	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	190.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan
5	4	16	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan
5	4	17		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>										
5	4	17	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	99.325.000	3 Paket	115.000.000	3 Paket	120.000.000	3 Paket	135.000.000	3 Paket	155.000.000	3 Paket
5	4	19		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										

5	4	19	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Program	50.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan
5	4	19	26	Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	50.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan
5	4	19	27	Musrenbang Tahun 2015	72.929.000	1 Dokumen	0		0		0		0	
5	4	19	28	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0		60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen
5	4	19	30	Kerjasama Anggota MPU	0		75.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg
5	4	19	37	Kajian Pengembangan UMKM Melalui pengembangan Produk Unggulan Agribisnis	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	0		0		0	
5	4	19	39	Rapat Teknis anggota MPU Sektor Koperasi	89.000.000	1 Keg	0		0		0		0	
5	4	19	40	Kerja sama Anggota MPU Sektor Koperasi dan UMKM, Sektor Perdagangan dan sektor Industri	50.000.000	1 Keg	0		0	0	0	0	0	0
5	4	19	43	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sektor Koperasi dan UMKM, Sektor Perdagangan dan Sektor Industri	50.000.000	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	19	128	Peningkatan jasmani dan rohani aparatur	0		20.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan
5	4	19	129	Evaluasi program dan kegiatan Koperasi dan UMKM	0		0		0		0		100.000.000	1 Dokumen
5	4	19	130	Pameran dan promosi produk anggota-anggota Mitra Praja Utama (MPU)	0		0		50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>20</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
5	4	20	1	Penyusunan laporan Keuangan	27.800.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	45.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan
5	4	20	3	Penyusunan Laporan Bulanan	10.715.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan
5	4	20	6	Penyusunan Renstra -	0		0		0		0		100.000.000	1 Dokumen
5	4	20	22	Penyusunan data kepegawaian	60.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan
5	4	20	35	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	76.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan
5	4	20	69	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	64.285.000	7 Dokumen	75.000.000	7 Dokumen	80.000.000	7 Dokumen	90.000.000	7 Dokumen	110.000.000	7 Dokumen
5	4	20	77	Peningkatan Data dan Informasi	70.017.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>25</b>		<b>Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan</b>										
5	4	25	25	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	0		85.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen
<b>TOTAL</b>					<b>6.080.000.000</b>		<b>19.305.000.000</b>		<b>20.551.000.000</b>		<b>21.186.100.000</b>		<b>22.669.210.000</b>	

## 2.2. Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu

Dari hasil evaluasi, dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2016 atau periode 2 perencanaan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung periode 2015 – 2019 untuk kinerja keuangannya sudah terealisasi sebesar Rp. 10.815.356.686,- atau sebesar 10,96 persen dari total anggaran renstra sebesar Rp. 98.641.044.000,-. Sedangkan untuk realisasi fisiknya sudah sebesar 25,28 persen. Realisasi fisik ini masih tergolong kecil dan jauh dari harapan karena tahun 2016 ini adalah periode tahun ke 2 pelaksanaan Renstra 2015 – 2019. Hal ini dapat di pahami dikarenakan ada beberapa program dan kegiatan pada Renstra periode 2015 – 2019 yang belum mendapatkan porsi anggaran karena terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Lampung.

Berikut adalah rekapitulasi kinerja Renja sampai dengan tahun 2016 terhadap Renstra periode 2015 – 2019. Rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2015 ditambah tahun 2016 dengan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan sampai dengan tahun 2016 (2015 + 2016) pada Renstra dikali 100 persen.

### 2.2.1. Matriks Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu



## 2.3. Rencana Kerja Tahun 2017

### 1. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja OPD, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UKM.
2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UKM
3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UKM melalui peningkatan kemampuan koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UKM melalui peningkatan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi, pengembangan di dalam negeri maupun ekspor serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.
5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UKM.
6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru
7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UKM
8. Penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja.

### 2. Sasaran

Untuk menunjang Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017, yang menjadi sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
2. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

3. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UKM berdasarkan hasil kajian.
  4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan ketrampilan SDM Koperasi dan UKM.
  5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk Koperasi dan UKM.
  6. Menumbuhkan wirausaha baru/pemula yang inovatif.
  7. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan semangat (*passion*) kewirausahaan di kalangan masyarakat
  8. Mengembangkan sistem perkaderan wirausaha baru/pemula.
  9. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
- Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada koperasidan UKM.

### 3. Program

Bahwa yang menjadi kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah :

1. Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM;
2. Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UKM;
3. Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UKM;
4. Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UKM;
5. Strategi peningkatan akses kepada sumberdaya produktif.

Atas dasar kebijakan yang ditetapkan tersebut, maka yang menjadi program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM
6. Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM
7. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/ Revitalisasi Kelembagaan
9. Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM
10. Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan.

#### 4. Kegiatan

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sebagai gambaran dalam melaksanakan kebijakan dan program yang telah dituangkan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya visi dan misi yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2016, ditetapkan kegiatan sebagai berikut :



1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan biaya Rp. 2.000.000,-
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 225.000.000,-
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 340.600.000,-
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 110.000.000,-
5. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 18.000.000,-
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan biaya Rp. 15.000.000,-
7. Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan biaya Rp. 40.000.000,-
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan biaya Rp. 16.000.000,-
9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 10.000.000,-
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 117.900.000,-
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan biaya Rp. 78.500.000,-
12. Pameran dan Promosi Pembangunan, dengan biaya Rp. 80.000.000,-
13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 94.600.000,-
14. Pengadaan Peralatan gedung kantor, dengan biaya Rp. 265.734.000,-
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan biaya Rp. 15.000.000,-
16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya Rp. 89.000.000,-
17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan biaya Rp. 10.000.000,-

18. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya Rp. 120.000.000,-
19. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 44.000.000,-
20. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 122.400.000,-
21. Penyusunan program dan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 85.000.000,-
22. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 42.306.000,-
23. Peningkatan Data dan Informasi, dengan biaya Rp. 52.000.000,-
24. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS, dengan biaya Rp. 61.990.000,-
25. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM, dengan biaya Rp. 150.000.000,-
26. Monitoring dan evaluasi koperasi penerima bantuan di 15 Kab/Kota, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
27. Pengawasan pelaksanaan USP bagi KSP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit, dengan biaya Rp. 96.250.000,-
28. Pendampingan pameran KUKM dalam dan luar negeri, dengan biaya Rp. 807.840.000
29. Pendataan dan pembinaan KUMKM, dengan biaya Rp. 600.000.000,-
30. Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT), dengan biaya Rp. 100.000.000,-
31. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 600.000.000,-
32. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
33. Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon/penerima dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
34. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 2.000.000.000

35. Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur, dengan biaya Rp. 300.000.000,-
36. Peningkatan dan pemahaman terhadap aturan perkoperasian, dengan biaya Rp. 62.458.000,-
37. Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan, dan penilaian KSP/USP, dengan biaya Rp. 52.840.000,-
38. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi, dengan biaya Rp. 127.062. 000,-
39. Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi, dengan biaya Rp. 63.320.000
40. Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 94.600.000,-
41. Diklat akuntabilitas bagi pengelola koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
42. Pembina dan pengawas koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
43. Penyelenggaraan musrenbang SKPD, dengan biaya Rp. 230.600.000,-

#### 2.3.1. Matriks RKT Tahun 2017

## **BAB III PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan bentuk rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah diharapkan dapat terlaksana sebesar **100%**.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017 ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2017.